

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat, S. (2025). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2023 tertinggi nasional*. Antara Jabar. <https://jabar.antaranews.com/berita/452700/indeks-keterbukaan-informasi-publik-jawa-barat-2023-tertinggi-nasional>
- Anggriawan, A. (2017). Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jepara 2017). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 1, 61–73.
- Aziz, Z. A. (2012). *Mengenal E-Government (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government sebagai Inovasi Pelayanan Publik)*. FISIP Universitas Hazairin.
- BPK, R. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id>
- BPK RI. (2024). *Daftar Opini LKPD Tahun 2019 s.d 2024 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat*. <https://jabar.bpk.go.id/opini-lkpd/>
- Candra, K. (2024). *Mantan Kadisbudpar Indramayu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tebing Air Terjun Buatan*. Berita Satu. https://www.beritasatu.com/jabar/2826657/mantan-kadisbudpar-indramayu-jadi-tersangka-kasus-korupsi-tebing-air-terjun-buatan#goog_rewarded
- Dan, P., Lanjut, T., Provinsi, P., & Barat, J. (2025). *Progres dan tindak lanjut*.
- Dharmawan, K. (2022). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Teori dan Praktik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, K. K. R. I. (2023). *DJPK Kementerian Keuangan RI*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.

- Familia Irene, B., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Saurmauli Pangaribuan, W. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 5(1), 179–195. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10754>
- Grasiana, M., Mau, Y., Sari, A. R., & Irianto, M. F. (2025). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi , Penerapan Prinsip Transparansi , Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)*. 2(4), 1–8.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2020). *Teori Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Keuangan Daerah* (Pertama). Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen* (2 (ed.)). BPFE-Yogyakarta.
- Hardjaloka. (2014). Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Helena Adventy Gudipung, Konstantinus Pati, & Yoseph Darius Purnama Ranga. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka). *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 66–81. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.889>
- Heryana, T. (2013). *Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur*. 1(1), 38–49.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government Edisi 2*. Preinexus.
- Jainuddin, S., Gaffar, & Mattoasi. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

- Daerah: Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Tidore Kepulauan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 5215–5229. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5193>
- Jubaedah, E. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pustaka Setia.
- Kadarisman, M. (2019). *Manajemen Kepegawaian*. Rajawali Pers.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian PAN-RB. (2023). *Laporan Kinerja Reformasi Birokrasi dan SPBE 2023*.
- Lolu, M., Perseveranda, M. E., Sonbay, Y. Y., & Manafe, H. A. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao*. 5(2), 9751–9766.
- Maharani, Q., & Gamayuni, R. R. (2025). *Pengaruh E-Government dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revi). Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Developme. (2003). *The e-Government Imperative*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264101197-en>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah*.

- Risya Nurindahsari, & Trisyanto, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4128>
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 179–184. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://online.fliphtml5.com/cyqfr/jppo/#p=5>
- Suhendro, S. (2024). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29(2), 148–155. <https://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574>
- Ulfi, I. H. (2022). *Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan*. 5(2), 70–83.
- Undang-Undang RI. (2008). *Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. 49, 69–73.
- United Nations Development Programme. (2001). *Human Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development*. Oxford University Press. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2001.pdf>
- Wahidmurni. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. *Bpk Ri*, 2588–2593. <https://www.bpk.go.id/id>
- Widyanti, R. (2018). *MENARA Ilmu Vol. XII, No.11 Oktober 2018*. XII(11), 118–126.